

## SISTEM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT

Oleh: Zilfaroni, S.Sos.I. MA

### *Abstract*

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya berorientasi dari, oleh, dan untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi penentu wawasan pembangunan masa depan. Masa depan merupakan impian atau cita-cita tentang keadaan masa mendatang. Maka proses pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan yang multisektoral, partisipatif, berdasarkan semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya pengembangan secara serasi, selaras dan sinergis untuk tercapainya cita-cita pemberdayaan yang menyampaikan keselamatan di dunia dan akhirat. Kesempurnaan sistem pengelolaan zakat merupakan salah satu cara yang efektif dalam agama Islam untuk mencapai cita-cita tersebut

*Oriented empowerment community development is towards holistic community involvement. There for the community awareness and involvement must become the determinant of future development vision, because future is a dream of better condition in terms of achieving the higher prosperity. The community development is implemented by holistic approach, participative, based on independent spirit, environmentally sound, and sustainable. It also implement resources harmoniously and synergistically so that is the dream of empowerment can be obtainet optimally whether concerning about the properity and welfare in the world or in the here after. Perfection system of zakat is one effective way of achieving economic empowerment from Islam religion to achieve that goal*

Key word: sistem, pemberdayaan, ekonomi

### **A. PENDAHULUAN**

Istilah “sistem” berasal dari perkataan “*sistema*” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem

tersebut. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komponen dimana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu.

Setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Padanya tentu mencakup elemen sistem, fungsi elemen, hubungan antar elemen, pranata (institusi) ,

Tujuan sistem mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran elemen sistem. Sistem ekonomi tidak akan terlepas dari unit-unit ekonomi seperti: rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi seperti: konsumen, produsen, buruh, investor dan pejabat-pejabat yang terkait. Lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Kapital (SDK), Sumber Daya Teknologi (SDT) fungsi-fungsi yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, seperti: fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, regulasi. Hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankan fungsinya.

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerja-sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan.

Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman *renaissance*, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan diterminisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan diterminisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.<sup>1</sup>

Karena kurang tepatnya pemahaman mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam. Hal paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama.

## **B. Konsep Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi;
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran;

Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi;

---

<sup>1</sup> Mardi Yatmo Hutomo, SU adalah Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Wangsamanggala Yogyakarta. Pokok-pokok pikiran dalam tulisan ini pernah disampaikan pada Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan BAPPENAS, Tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta.

3. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.<sup>2</sup>

Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*). Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan.

**Pandangan pertama**, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to no body*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasangkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.

**Pandangan kedua**, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to every body*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri.

**Pandangan ketiga**, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to no body* dan pandangan *power to every body*. Menurut pandangan ini, *Power to no body* adalah kemustahilan dan *power to every body* adalah *chaos* dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS; Jakarta h.: 269: 1-4.

<sup>3</sup> Mengenai ketiga pandangan ini (*Power To Nobody, Power To Verybody, dan Power To Powerless*) dapat dibaca pada tulisan **A.M.W. Pranarka** dan **Vidhyandika Moeljarto** mengenai Pemberdayaan (*Empowerment*) *Cit* Pemberdayaan: Konsep, kebijakan dan Implementasi. Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (penyunting); 1996; hal. 45-70. CSIS; Jakarta.

Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan.

**Konsep pertama**, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘**daun**’ dan ‘**ranting**’ atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah *given* tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *magical paradigm*.

**Konsep kedua**, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘**batang**’ atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumber daya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *naïve paradigm*.

**Konsep ketiga**, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘**akar**’ atau pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkir balikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya.

Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah penggulingan *the powerful*. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai *critical paradigm*. Oleh Pranarka dan Moelyarto (1996), karena kesalahpahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah.

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi

penguasaan faktor-faktor produksi. Perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Fiedmann,<sup>4</sup> pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis.

Pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.

Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul(1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Melalui berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem

---

<sup>4</sup> Pendekatan Friedmann, sebenarnya pendekatan keluarga. Friedmann memiliki pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik, dan kekuatan psikologis. Pandangan Friedmann ini kemudian menghasilkan rumusan mengenai pemberdayaan sebagai **proses untuk masyarakat lemah memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumberdaya**. Baca, Friedmann (1992): *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher.

spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik.

Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.

### **C. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Ekonomi Islam adalah sains sosial yang mengkaji persoalan ekonomi yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam.<sup>5</sup> Hasanuzzaman juga menjelaskan salah satu cara mendefinisikan ekonomi Islam adalah dengan menggabungkan ekonomi modern dengan ekonomi Islam. Oleh sebab itu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari ekonomi dalam prinsip Islam atau membawa ekonomi sejalan dengan syariah.<sup>6</sup> Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Berbeda dengan halnya sistem ekonomi sebagai hasil penemuan manusia.

Dalam ekonomi Islam, antara agama dan ekonomi mesti terlihat jelas dan mempunyai hubungan yang sempurna. Alam yang diperuntukkan bagi manusia mesti dikelola sesuai dengan tujuan penciptaan-Nya. Oleh sebab itu semua aktivitas manusia yang bersifat muamalat tidak terlepas dari hubungan yang erat antara ekonomi dengan agama. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Aspek Ekonomi merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan dan keyakinan satu bagian saja dari sistem Islam.
- b) Aspek Ekonomi merealisasikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat. Cita-cita ekonomi adalah untuk merealisasikan kekayaan dan kesejahteraan hidup dan keuntungan umum bagi masyarakat, bukan untuk menciptakan persaingan, monopoli dan sikap mementingkan diri sendiri.

---

<sup>5</sup> Ekonomi Islam dikatakan sebagai sains sosial, karena Ilmu Ekonomi mempelajari kehidupan manusia bermasyarakat (termasuk ilmu sosiologi dalam arti yang terbatas). M.A Manan, *Islamic Economics Theory and Practice*, Idarah Adabiyat: Delhi, 1970), hal. 3

<sup>6</sup> Hasanuzzaman, *Defening Islamic Economic*, *Jurnal Of Islamic Banking and Finance*, vol 8 April-Juni, 1991, hal. 14

Banyak di lihat sekarang tentang sistem pemberdayaan ekonomi umat, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun dari pihak luar negeri. Tetapi hal demikian kurang berhasil ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena sistem yang diberikan tersebut dengan cara konvensional, contoh diberikan pinjaman dari pihak bank kepada masyarakat miskin dengan memakai sistem bunga. Walaupun bunga peminjaman itu cukup besar tetap juga di ambil oleh peminfaat. Hal ini di lakukan karena banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem perekonomian secara syariah atau perbankan syari'ah.

Faktor penyebabnya kurangnya sosialisasi dan minimnya sumber daya manusia yang mengenai sistem perbankan syariah. Ini terlihat dari banyaknya banker-banker yang berasal dari perbankan konvensional yang menjadi banker di bank-bank syariah. Kalau ini dibiarkan terus maka akan terjadi manipulasi dalam hal produk syariah yang akan ditawarkan kepada masyarakat yang berubah jadi produk konvensional yang dibungkus dengan kemasan syari'ah.

#### D. Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat timbul sebagai keyakinan dalam agama Islam. Hal ini terbukti bahwa agama islam mengajarkan nilai-nilai prososial keummatan, dimana tidak hanya memiliki efek di dunia saja, akan tetapi memiliki efek positif terhadap kehidupan akhirat. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan Rasulullah

عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ( رواه مسلم )<sup>7</sup>

*Dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda waspadalah terhadap kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat dan jauhilah kekikiran karena kekikiran inilah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu , mengantarkan mereka kepada pertumpahan darah dan menghalalkan segala cara. ( HR. Muslim )*

Senada dengan hadis di atas Islam meletakkan keyakinan sebagai dasar perbuatan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini membawa nilai kehidupan sosial bermasyarakat tidak hanya berakhir di dunia saja. Akan tetapi keyakinan beragama membuat motivasi

---

<sup>7</sup> Abû Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâburiy, *al-Jâmi' al- Shahih* (selanjutnya di sebut Imam Muslim), (Bairut: Dar al-Fikr, tth), ( Maktabah Syamilah )



instrinsik tertentu untuk permasalahan umat. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ( رواه ابو داود )<sup>8</sup>

*Dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesusahan di dunia niscaya Allah akan melepaskannya dari kesusahan–kesusahan di hari kiamat. Dan siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang susah, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan siapa menutup aib seorang muslim niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. ( HR. Abu Daud)*

Tidak hanya sebatas nilai sosial bahkan agama Islam meletakkan zakat sebagai salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dengan rukun dan syarat tertentu. Melalui zakat diharapkan kestabilan ekonommi umat dapat diantaskan. Peran strategis zakat untuk mensejahterakan ummat, bukan hanya janji kosong, ataupun angan-angan, ia telah terbukti begitu efektif sedari zaman kekhalifahan Umar bin Khathab, Abu Ubaid menuturkan bahwa Mu'adz bin Jabal pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada khalifah Umar, karena beliau tidak lagi menemukan mustahiq zakat di Yaman, tapi dikembalikan oleh Umar, Mu'adz kemudian mengirimkan sepertiga hasil zakat itu yang kembali ditolak oleh Umar, beliau berkata, "saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tapi aku mengutusmu untuk memungut zakat dari orang kaya disana dan dibagikan kepada kaum miskin diantara mereka juga." Mu'adz menjawab, "kalau disana saya temukan orang miskin, buat apa saya susah-susah mengirimkannya kepada anda." Pada tahun kedua, kembali Mu'adz mengirimkan separuh dari hasil zakat yang dipungutnya, dan Umar kembali menolaknya, begitu juga ditahun ketiga, kiriman tersebut dikembalikan oleh Umar, Mu'adz berkata, "saya tidak menjumpai seorangpun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut."<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Abu daud, *Sunan Abi Daud, Maktabah Syamilah*

<sup>9</sup> Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Bogor, Lintera Antar Bangsa, 2002*

Sebuah potret yang begitu mengagumkan, apalagi negara kita adalah negara muslim terbesar didunia, yang secara logika sederhana, *muzakki*-nya (pembayar zakat) tentu sangat banyak, dan kalau ini bisa kita maksimalkan, tentu kita akan segera bebas dari lilitan hutang dan berdiri dengan penuh marwah dan kehormatan. Tetapi banyak ekonom yang meragukan kemampuan zakat, mereka berpendapat bahwa zakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena persentasenya sangat kecil, yaitu hanya 2,5 persen. Bagaimana mungkin zakat akan mampu mempengaruhi, misalnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan persentase sebesar itu.

Munculnya keragu-raguan tersebut adalah karena hingga saat ini belum ada satu negara Muslim pun yang dapat dijadikan sebagai model yang tepat. Malaysia sebagai contoh, memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan zakat dibandingkan Indonesia. Namun demikian, dalam hal pendayagunaan zakat, penulis melihat justru Indonesia yang lebih unggul dibandingkan Malaysia. Indonesia memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Muslim lainnya dalam hal pemberdayaan dana ZIS. Tetapi karena dana zakat yang ada di Indonesia jumlahnya masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1 persen dari total GDP, maka 'seolah-olah' ada tidak adanya zakat tidak mempengaruhi perekonomian kita secara makro. Tentu saja itu adalah anggapan yang salah.

Salah satu lembaga pemberdaya masyarakat Islam adalah adanya keberadaan lembaga amil zakat dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan umat. Akan tetapi perlu kiranya rancangan besar *grand scenario* yang fokus dan teruji yang dijadikan sebagai sub sistem pemberdayaan melalui beberapa fokus di antaranya;

1. Mengoptimalkan Kerja Lembaga 'Amil Zakat (LAZ)
2. Memperluas cakupan objek zakat yang sesuai dengan kaidah syari'ah. Menurut Dr. Didin Hafiduddin mengatakan sumber zakat dalam Islam menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan *ijmali/global* segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dengan pendekatan ini semua jenis harta yang belum ada dizaman Rasulullah, tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya. Adapun pendekatan kedua yakni pendekatan *tafshili/terinci*, yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>10</sup>
3. Mengembangkan Harta Zakat Menjadi Usaha Produktif

---

<sup>10</sup> DR. KH. Didin Hafiduddin, M. Sc, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 2002, Penerbit: Gema Insani, h. 15-16.

Simposium yayasan zakat internasional III, yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 2 Desember 1992 mengeluarkan fatwa bahwa harta zakat boleh diinvestasikan dengan syarat :

- a. Harta tersebut tidak dibutuhkan segera
- b. Investasi dilakukan dalam bidang yang legal
- c. Ada jaminan bahwa modal investasi tetap sebagai uang zakat
- d. Uang mudah dicairkan ketika mustahiq zakat sangat membutuhkan segera.
- e. Ada jaminan bahwa usaha tersebut menguntungkan

Simposium juga memfatwakan bolehnya harta zakat untuk membangun proyek jasa seperti rumah sakit, perpustakaan, sekolah dan lain-lain dengan syarat:

- 1) Pihak yang mendapatkan jasa tersebut adalah mustahiq zakat saja, sedangkan selain mereka hanya dibolehkan dengan dipungut biaya.
- 2) Modal tetap atas nama mustahiq, sekalipun bukan mereka yang mengelola langsung.
- 3) Bila proyek tersebut dijual maka hasilnya tetap berstatus uang zakat.

Dengan demikian sebaiknya harta zakat lebih dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti diinvestasikan atau menjadi modal usaha. Banyak lagi yang bisa dikerjakan dalam memaksimalkan dana zakat bagi usaha yang lebih produktif, tentu dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, dengan harapan ini menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan ummat.

Konteks pengembangan masyarakat Islam pada dasarnya merencanakan dan mengupayakan suatu perubahan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupannya menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera baik secara lahir maupun batin sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri.

Dalam upaya mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera baik secara lahir maupun batin maka tentunya harus dilakukan pemberdayaan secara terus menerus dan berkelanjutan dalam segala bidang, akan tetapi setidaknya ada 3

bidang yang mendesak untuk segera diperjuangkan dan diberdayakan yaitu bidang ruhaniyah, intelektual dan bidang ekonomi. Pemberdayaan dalam konteks Pengembangan Masyarakat Islam ini akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan melalui sebuah organisasi Islam. Sebab untuk merubah suatu tatanan sosial masyarakat itu adalah pekerjaan yang tidak mudah sehingga perlu adanya sekelompok orang atau sekelompok organisasi yang saling bekerjasama dan saling bahu membahu agar lebih mudah dalam mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam hal ini frekuensi pelaksanaannya masih jarang maka perlu ditingkatkan.

Hendaknya para da'i dalam dakwahnya tidak hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam secara verbal dan konvensional yang wujudnya hanya *tabligh* saja akan tetapi lebih ditekankan pada aktualisasi nilai-nilai Islam secara universal sebagai wujud penerapan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam.

### Daftar Kepustakaan

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigm Aksi Metodologi*, Editor: Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, Penerbit: Pustaka Pesantren, 2005, Yogyakarta.

Mardi Yatmo Hutomo, SU, *Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan BAPPENAS*, Tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta.

Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS; Jakarta.

Friedmann (1992): *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher.

M.A Manan, *Islamic Economics Theory and Practice*, Idarah Adabiyat: Delhi, 1970.

Hasanuzzaman, *Defening Islamic Economic, Jurnal Of Islamic Banking and Finance*, vol 8 April-Juni, 1991.

Huraerah Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung. Humaniora, 2003.

Maktabah Syamilah